

**ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH
KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DALAM
MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(SDGs) DI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

**OLEH :
AYUSTINA NUR UMAMI
NIM : G94216155**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ayustina Nur Umami

NIM : G94216155

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Mewujudkan
Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 07 April 2020

Saya yang menyatakan,



Ayustina Nur Umami

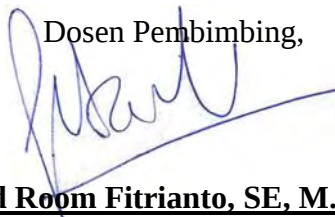
NIM. G94216155

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Ayustina Nur Umami NIM. G94216155 ini telah diperiksa dan disetujui untuk melakukan Munaqasah.

Surabaya, 07 April 2020

Dosen Pembimbing,



Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA.

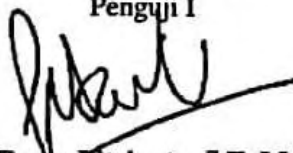
NIP. 197706272003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang telah disusun oleh Ayustina Nur Umami NIM. G94216155 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Senin, 18 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam menempuh program studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi,

Penguji I



Achmad Rooda Fitrianto, S.E, M.E.I, MA.

NIP. 197706272003121002

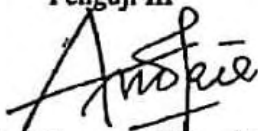
Penguji II



Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE, M.Si.

NIP.198209052015031002

Penguji III



Andriani Samsuri, S.Sos, MM.

NIP. 197608022009122002

Penguji IV



Mazidah Mazza Basya, S.HIM.SEL.

NIP.199001092019032014

Surabaya, 18 Mei 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Ampel Surabaya



Dekan H. M. Ali Arifin, M.M

NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayustina Nur Umami
NIM : G94216155
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : ayustina585@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Kecamatan Ngantru

Kabupaten Tulungagung

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 September 2020

Penulis

(Ayustina Nur Umami)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung serta mengetahui dan menganalisis tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan informan baik secara langsung atau media online, observasi langsung pada tempat informan, dokumentasi yang berupa data pada Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Tulungagung dan literasi keuangan syariah sebagai pelengkap hasil penelitian.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data dengan menggolongkan informan yang mana merupakan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI), *display* data dengan mengumpulkan informasi dari informan berupa literasi keuangan syariah dalam pemanfaatan remitansi sehingga dapat ditarik kesimpulan, yang terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi yang mana memunculkan temuan baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung berdasarkan analisis komponen-komponen literasi keuangan syariah yang mana menghasilkan 28,6% dari informan mempunyai tingkat literasi keuangan syariah yang masih tergolong rendah atau *less literate*, sedangkan 71,4% dari informan tidak mempunyai literasi keuangan syariah atau *not literate*. Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah sangat penting dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mana terdapat tiga tujuan yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih terampil dalam mengelola dana remitansi serta meningkatkan pengetahuan dan menggunakan produk lembaga keuangan syariah demi memajukan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Remitansi, Pekerja Migran Indonesia (PMI), *Sustainable Development Goals* (SDGs)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Kajian Pustaka.....	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	20
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian	21
1.7 Definisi Operasional.....	23
1.8 Metode Penelitian.....	24
1.9 Sistematika Pembahasan	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43
2.1 Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	44
2.1.1 Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan Syariah	53
2.1.2 Komponen-Komponen Literasi Keuangan Syariah.....	58
2.2 Literasi Keuangan Syariah Keluarga PMI Dalam Mewujudkan SDGs	62
2.2.1 Peranan dan Kontribusi PMI Terhadap Perekonomian dan Pembangunan.....	70

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1.1 Pembagian Luas Tanah di Kecamatan Ngrantru Kabupaten	
Tulungagung.....	8
Bagan 1.2 Kerangka Konseptual Penelitian.....	
	27
Bagan 4.3 Pemanfaatan Dana Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI)	120
Bagan 4.4 Hasil Analisis Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran	
Indonesia (PMI).....	121

BAB I

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu fenomena alam yang saat ini banyak terjadi di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Pada BAB I ini, peneliti akan mengungkapkan hal yang melatarbelakangi banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung serta tingkat literasi keuangan syariah pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga dapat memunculkan rumusan masalah yang selanjutnya dapat dilakukan analisis oleh peneliti. Dalam analisis penelitian ini menggunakan beberapa tahapan penelitian dan metode penelitian untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada. Peneliti juga mengembangkan studi literatur dari riset yang telah ada sebelumnya sebagai pendukung penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam mempunyai banyak potensi. Salah satu potensi yang menjadi andalan penduduk Indonesia adalah usaha-usaha di sektor pertanian dan nelayan. Selain bertumpu pada sektor ekstraktif alam, penduduk Indonesia juga menekuni pekerjaan kantoran, pabrik, pertambangan, konstruksi, bidang pendidikan, perdagangan, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Hal tersebut mempengaruhi dinamika perekonomian masyarakat. Usaha-usaha dilakukan untuk meningkatkan pendapatan karena tuntutan kebutuhan hidup menjadikan seseorang lebih giat bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

yang semula mempunyai pekerjaan formal dapat berubah menjadi pekerja informal. Sehingga apapun pekerjaan yang mereka lakukan diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya. Pada sektor informal merasa kewalahan dan tidak bisa menampung semua tenaga kerja. Hingga pada akhir tahun 2006, sekitar 11% penduduk lebih banyak yang menganggur.

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan hingga saat ini masih menjadi perhatian utama di setiap negara di dunia khususnya negara-negara berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang mana menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Dilihat dari sudut pandang positif, tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Namun disisi lain, meningkatnya tenaga kerja justru sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit diselesaikan oleh pemerintah. Dampak dari jumlah penduduk yang meningkat yaitu kurangnya peran pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga tidak ada tenaga kerja yang terserap, konsekuensinya yaitu terciptanya pengangguran (Ahmad Soleh¹, 2017).

Saat ini, permasalahan bangsa dan tingginya angka pengangguran, pemanfaatan potensi sumber daya pada era bonus demografi semakin ditingkatkan. Era bonus demografi seperti saat ini ditandai dengan semakin naiknya jumlah masyarakat usia produktif di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi peluang atau tantangan bagi Indonesia untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju (Rahman, 2019). Untuk mencegah potensi

Masalah ketenagakerjaan menjadi problematika besar yang terjadi di Indonesia. Dalam konsep kependudukan, keuntungan adanya bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena semakin besarnya jumlah penduduk usia produktif semakin besar pula pendapatan yang didapat sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hingga keadaan tersebut lebih dikenal sebagai jendela kesempatan (*windows of opportunity*) bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi manufaktur, infrastruktur, maupun UKM karena banyaknya angkatan kerja. Apabila suatu negara dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan baik, maka negara bisa dikatakan lebih maju dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jati, 2015:2).

[illegible]

(2016), pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi-potensi positif yang terpendam dalam diri siswa didik. Dengan adanya pendidikan bermutu dapat menghasilkan tenaga-tenaga muda potensial yang tangguh dan siap bersaing dalam dunia yang lebih luas.

Menurut Widodo (2016: 2-3), realita di lapangan menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Indonesia sebagai sumber daya yang potensial masih jauh dari harapan. Secara praktik, pendidikan di Indonesia menunjukkan banyak tantangan dan masalah. Sedangkan secara otomatis, kondisi ini akan berdampak pada lulusan yang dihasilkan karena rendahnya mutu pendidikan maka rendah pula kualitas lulusan yang dihasilkan. Terpenuhi pendidikan yang bermutu menyebabkan siswa akan mendapatkan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup. Sehingga setelah menyelesaikan pendidikannya, mereka diharapkan langsung dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Seperti dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, BAB X Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini menunjukkan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak apabila didukung dengan kemampuan dan keterampilan yang baik. Pada kenyataannya ketenagakerjaan di Indonesia masih menghadapi masalah yang kompleks, seperti tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya

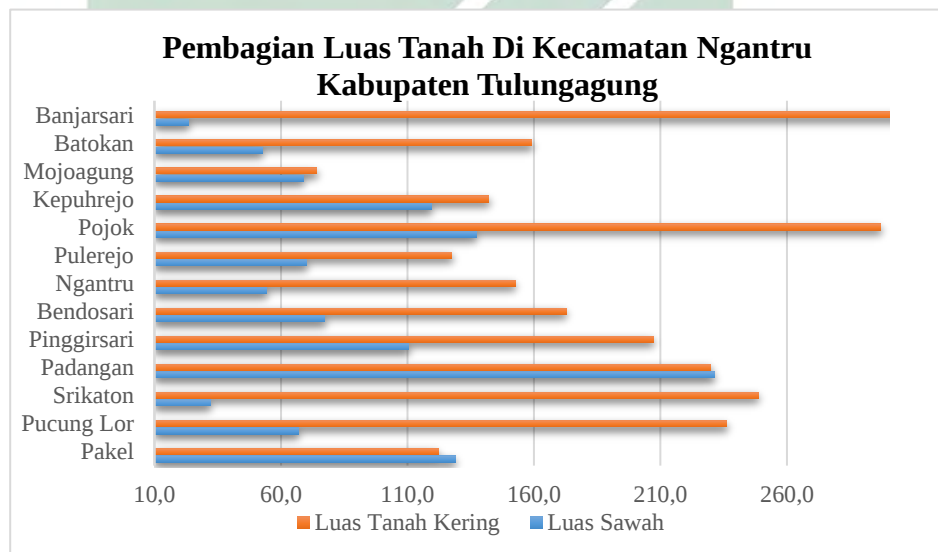
lapangan pekerjaan, rendahnya produktivitas pekerja serta masih belum maksimalnya penerapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK). Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa orang Indonesia lebih banyak yang bermigrasi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya (Widodo, 2016).

Migrasi Internasional adalah salah satu pilihan yang dianggap paling rasional meskipun mereka tahu risiko yang akan terjadi. Menurut Wafirotin (2016), kesempatan kerja yang minim dan penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, mendorong seseorang untuk mencari tambahan penghasilan dengan bermigrasi ke luar negeri. Kebanyakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja sebagai tenaga buruh. Hasil jerih payah yang mereka peroleh di luar negeri akan mereka kirimkan ke pihak keluarganya secara rutin. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab para PMI untuk menafkahi keluarga yang ada di tanah air. Dampak dari kegiatan mengirimkan gaji secara rutin tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarga PMI tersebut, baik digunakan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Akhir-akhir ini, migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi isu nasional dikarenakan timbulnya berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia. Salah satu isu yang sering diangkat di media yaitu tentang isu ekonomi. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Keberadaan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hal tersebut juga berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Di Kecamatan Ngantru terdapat 13 (tiga belas) desa, yang mana setiap kepala keluarga mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Adapun pekerjaan masyarakat setempat antara lain sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, restoran, perangkat kecamatan, perangkat desa, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang ada di pedesaan memang tidak selamanya dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti halnya buruh tani yang merupakan mayoritas pekerjaan yang banyak ditekuni oleh masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Pembagian Luas Tanah Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

[illegible]

Sehingga mereka memutuskan untuk menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal tersebut dapat memacu keinginan orang lain ketika mereka membawa kesuksesan di kampung halaman. Gaji yang mereka kirimkan ke kampung halaman digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan, baik kebutuhan produktif atau konsumtif. Sehingga dalam permasalahan ini pemerintah desa, kecamatan maupun kota harus bertindak tegas dalam menanggapi hal tersebut. Seperti halnya keluar masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tanah air ini untuk mencari pekerjaan.

[illegible]

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam proposal skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” adalah sebagai berikut:

1. Tingkat literasi keuangan syariah yang kurang memadai pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai peran lembaga keuangan syariah.
3. Penggunaan remitansi yang kurang maksimal oleh keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).
4. Minimnya peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah agar objek penelitian lebih terfokus atau terarah sehingga tidak terjebak pada bagian penelitian yang lain. Untuk itu peneliti hanya membatasi dua masalah dari identifikasi masalah, yaitu:

1. Peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

1.4 Kajian Pustaka

Sebuah penelitian tidak bisa terbangun tanpa penelitian terdahulu. Skripsi ini berusaha menggali celah yang belum terjawab dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan awal kami menulis tema ini. Adapun beberapa penelitian yang menjadi dasar peneliti untuk dikembangkan dalam skripsi ini adalah:

1. Luthfy H (2017: 96-87) “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah pada anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas berada pada kategori sedang. Ada beberapa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas antara lain faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Sedangkan faktor pekerjaan, pengalaman kerja, keterkaitan informan terhadap lembaga keuangan syariah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas.
2. Dian Wahyunita (2019: 73) “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Sosio Demografi Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Pada Karyawan KSPPS BMT Tumang Boyolali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik literasi keuangan syariah karyawan maka akan semakin baik pula manajemen keuangan pribadi. Karyawan dengan pemahaman keuangan yang baik, mereka akan lebih memperhartikan keputusan keuangan yang baik dalam menabung, mengelola uang masuk dan keluar, berhati-hati dalam berhutang dan memperhatikan masa pensiun sejak dini.
3. Akmal & Saputra (2016: 243) “Analisis Tingkat Literasi Keuangan”. Hasil dari penelitian ini adalah literasi keuangan mahasiswa FEBI

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan keuangan masyarakat tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tingkat keuangan yang dimilikinya, karena bisa disebabkan oleh latar belakang dan lingkungan sosial yang sangat berbeda sehingga pengendali keputusan-keputusan keuangannya tidaklah sepenuhnya tergantung pada literasi keuangan.

- [illegible]

Haryati (388) “Remitansi Tenaga Kerja Indonesia: Dampaknya Terhadap Inflasi dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”. Hasil dari penelitian ini adalah remitansi dapat mempengaruhi jumlah uang beredar di daerah asal darimana remitansi berasal sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang konsumtif, remitansi dapat merangsang para pedagang untuk menentukan barang atau jasa dalam menetapkan harga yang lazim, sebagian besar remitansi dihabiskan untuk barang atau jasa konsumtif dan hanya sedikit yang dihabiskan untuk barang atau jasa produktif, remitansi adalah faktor yang secara positif dapat mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah asal.

9. Alim Harun Pamungkas, Vevi Sunarti dan Wendi Ahmad Wahyudi (2018: 302) “PKMB Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs”. Hasil penelitian ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah tugas pendidikan. Seperti halnya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, PKMB Widya Dharma Nagari mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan program dengan menggalas semacam “pusat layanan latihan” yang mana menyediakan berbagai layanan program yang berhubungan dengan cakap dalam dunia kerja.
10. Ishartono dan Santoso Tri Raharjo (2016: 163) “Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya SDGs ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Karena kemiskinan menjadi isu paling penting dan utama, selain dua pencapaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, maka disusunlah 17 tujuan SDGs.

Tabel 1.2 Perbedaan Peneliti Terdahulu dan Sekarang

NO.	Kajian Kepustakaan	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian dari Haidar Luthfy dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas Serta	Persamaan penelitian ini adalah tentang tingkat literasi keuangan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah tersebut.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti. Peneliti terdahulu meneliti pada Anggota Syirkah As-salam, Sedangkan

	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”.		peneliti sekarang meneliti Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2.	Penelitian dari Dian Wahyunita dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Sosio Demografi Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Pada Karyawan KSPPS BMT Tumang Boyolali”.	Persamaan penelitian ini adalah tentang tingkat literasi keuangan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah tersebut.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti. Peneliti terdahulu meneliti pada karyawan KSPPS BMT Tumang Boyolali, Sedangkan peneliti sekarang meneliti Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).
3.	Penelitian dari Huriyatul Akmal dan Yogi Eka Saputra dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan”.	Persamaan penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan tersebut.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti. Peneliti terdahulu meneliti pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang, Sedangkan peneliti sekarang meneliti Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perbedaan juga terdapat pada objek penelitian. Peneliti terdahulu meneliti tingkat literasi keuangan, sedangkan peneliti sekarang meneliti tingkat literasi keuangan syariah.
4.	Penelitian dari Rahmawati Deylla Handida dan Maimun Sholeh dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim	Persamaan penelitian ini adalah tentang tingkat pengetahuan dan tingkat literasi keuangan syariah.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti. Peneliti terdahulu meneliti masyarakat di DIY, Sedangkan peneliti sekarang meneliti keluarga PMI yang ada di Indonesia.

	Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.		
5.	Penelitian dari Agus Yulianto dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Jasa Lembaga Keuangan Syariah”.	Persamaan penelitian ini adalah tentang tingkat literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk atau jasa lembaga keuangan syariah.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti. Peneliti terdahulu menggunakan metode analisis regresi logistik biner, Sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA).
6.	Penelitian dari Mita Noveria dengan judul “Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung”.	Persamaan penelitian ini adalah tentang tingkat literasi keuangan syariah yang mana dilihat dari remitansi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti. Peneliti terdahulu meneliti mantan PMI yang berulang kembali ke luar negeri, Sedangkan peneliti sekarang meneliti keluarga PMI yang ada di Indonesia.
7.	Penelitian dari Bayu Dibyantoro dan Muhammad Mukti Alie, “Pola Penggunaan Remitan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Dengan Asal”.	Persamaan penelitian ini adalah penggunaan remitan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah asal.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti. Peneliti terdahulu lebih terfokus kepada penggunaan remitan PMI, Sedangkan peneliti sekarang terfokus pada tingkat literasi keuangan para PMI.
8.	Penelitian dari Eny Haryati dengan judul “Remitansi Tenaga Kerja Indonesia: Dampaknya Terhadap Inflasi dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”	Persamaan penelitian ini adalah penggunaan remitan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah asal.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti. Peneliti terdahulu lebih terfokus kepada penggunaan remitansi PMI serta dampak terhadap inflasi, Sedangkan peneliti sekarang terfokus pada

			penggunaan remitansi PMI.
9.	Penelitian dari Harun Pamungkas, Vevi Sunarti dan Wendi Ahmad Wahyudi dengan judul “PKMB Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs)”	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pendidikan demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan target SDGs.	Perbedaan dari terdapat pada objek penelitian. Penelitian terdahulu terfokus pada kegiatan PKMB Widya Dharma Nagari dalam pusat layanan pelatihan pada dunia kerja. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada mewujudkan tiga SDGs (memmberantas kemiskinan, pendidikan berkualitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif oleh keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
10.	Penelitian dari Ishartono dan Santoso Tri Raharjo dengan judul “Sustainable Development (SDGs) Pengentasan Kemiskinan”. Dan Golas	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama dalam pemberantasan kemiskinan di Indonesia.	Perbedaan dari terdapat pada objek penelitian. Penelitian terdahulu lebih membahas SDGs secara global. Sedangkan penelitian sekarang lebih terfokus pada tiga tujuan yaitu memmberantas kemiskinan, pendidikan berkualitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa ataupun pihak fakultas yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pembandingan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat menambah koleksi perpustakaan.

- c. Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Keluarga Kerja Indonesia (PMI) dan Masyarakat Luas

sebagai salah satu bahan pembanding. Selain penelitian ini dapat sebagai sumbangan karya ilmiah dapat menambah koleksi perpustakaan.

c. Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Keluarga Indonesia (PMI) dan Masyarakat Luas

Diharapkan PMI ataupun keluarga

menginterpretasikannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah sekelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan serta menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa dan membuat rencana serta tindakan. Dalam metode penelitian PRA ini masyarakat desa sendiri yang lebih memiliki dan saling berbagi informasi tersebut. Dalam metode ini masyarakat yang menjadi responden bisa menarik diri setiap saat apabila merasa kurang nyaman bila pendapatnya dikutip dalam penelitian ini. (Chambers, 1996)

Menurut Fachrul Ali (2013), memahami desa secara partisipatif adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam proses perencanaan dan kebijakan yang nyata. Pendekatan dan metode ini semakin luas diakui kegunaannya ketika paradigma pembangunan berkelanjutan mulai dipakai sebagai landasan pembangunan di negara-negara berkembang.

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) menjadi salah satu cara untuk memecahkan permasalahan yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menganalisis keadaan yang ada di sekitar. Seperti halnya kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan

Ngantru Kabupaten Tulungagung yang masih memerlukan penanganan yang lebih intensif. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus bisa dibaca, dianalisis, dan dipikirkan potensi serta peluang seluas-luasnya menjadi pelaku aktif dalam mewujudkan proses pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan ekonomi yang menjadi salah satu faktor terjadinya kesenjangan dalam masyarakat. Seperti halnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja di luar negeri demi memenuhi kebutuhan keluarga yang ada di tanah air khususnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Perlunya pemahaman dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mengalokasikan dana kiriman atau remitansi untuk pemenuhan kebutuhan produktif atau konsumtif. Karena apabila mereka tidak memanfaatkan dengan baik maka akan merugikan mereka sendiri.

Selain itu proses pengiriman dana atau uang juga memerlukan perantara dari suatu lembaga swasta atau bank. Dengan masyarakat yang didominasi oleh muslim ini perlu dirasa untuk mengenal produk-produk syariah atau layanan jasa keuangan di Indonesia. Dengan mengenalkan lembaga keuangan syariah diharapkan masyarakat dapat mengonsumsi atau menggunakan produk halal lainnya.

melaksanakan program ini. Hal tersebut yang nantinya akan mewujudkan program pemerintah *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebelum penelitian, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan metode yang digunakan. Peneliti menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang mana bukan hanya peneliti yang melaksanakannya, akan tetapi masyarakat juga melaksanakannya. Setelah itu peneliti menentukan objek penelitian berupa peningkatan literasi keuangan syariah pada masyarakat. Adapun masyarakat yang dipilih sebagai informan adalah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Alasan pemilihan informan dikarenakan banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Setelah menentukan informan langkah selanjutnya adalah mencari informasi dengan memberikan beberapa draft pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut mengacu bagaimana penggunaan atau pemanfaatan dana remitansi dari keluarga yang ada di luar negeri serta meningkatkan literasi keuangan syariah mereka. Informasi-informasi yang peneliti dapatkan dari informan selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada disekitar. Hasil penelitian diharapkan dapat mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada tujuan poin kesatu, keempat dan kedelapan.

Pengenalan masalah pada masyarakat dalam penelitian ini berupa faktor yang menyebabkan rendahnya literasi keuangan syariah yang ada di

Beberapa alternatif pemecahan masalah seperti memberikan menggunakan produk dan jasa keuangan syariah lebih aktif lagi dilakukan oleh keluarga PMI serta belajar bagaimana mengelola keuangan yang baik sesuai syariat Islam. Setelah terbentuknya alternatif pemecahan masalah, dapat mempermudah dalam pelaksanaan dan pengarahan dalam penelitian ini. Pelaksanaan dan pengarahan mulai dari kebiasaan dalam menyisihkan sebagian hasil remitansi pada produk dan layanan jasa lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah atau non bank syariah, mencatat pengeluaran pada setiap transaksi, membedakan keperluan produktif dan konsumtif juga pembelian dengan pengeluaran besar atau kecil sehingga hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

[illegible]

Disisi lain, keluarga PMI telah rutin menyisihkan sebagian hasil remitansi untuk kebutuhan produktif dan konsumtif serta penyisihan dana untuk kewajiban berupa dana kebajikan dan dana tidak terduga. Dengan adanya monev ini diharapkan agar masyarakat lebih giat dalam memanfaatkan lembaga keuangan syariah seperti menabung setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali apabila terkendala jarak yang menjadi faktor tidak rutinnya penggunaan produk atau jasa lembaga keuangan syariah.

1.8.1 Lokasi Penelitian

[illegible]

1. Data Primer

2. Data Sekunder

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

[illegible]

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian langsung atau penelitian lapangan kepada informan atau subjek penelitian. Menurut Supardi (2005: 34) menuturkan bahwa “Penelitian lapangan dapat disebut penelitian empiris, maksudnya penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan saat proses pengerjaan penelitian”.

Wawancara adalah sebuah cara untuk melakukan pertemuan dua pihak yaitu *interviewer* yang memberikan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut untuk saling bertukar informasi dan ide yang membahas tentang satu pokok permasalahan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Pemerintah di Kabupaten Tulungagung dan para informan yaitu keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).

[illegible]

2. Observasi

[illegible]

Dokumentasi merupakan data sekunder yang tidak ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tingkat literasi keuangan syariah seperti data dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dokumentasi dapat berupa data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan atau lembaga. Dokumentasi juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode penelitian kualitatif seperti wawancara dan observasi.

Peneliti akan mengambil data atau dokumentansi dari data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Tulungagung yang mana berisi tentang kehidupan masyarakat Tulungagung khususnya Kecamatan Ngantru itu sendiri. Data tersebut meliputi letak geografis Kecamatan Ngantru, jumlah populasi dari penduduk Kecamatan Ngantru, tenaga kerja di Kecamatan Ngantru dan lain sebagainya. Dan juga peneliti akan mendapatkan data tentang masyarakat Kecamatan Ngantru di Kantor Pemerintahan Kecamatan Ngantru.

Tabel 1.3 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan Penulisan Skripsi	Kerangka/metode	Jenis data yang dikumpulkan	Tujuan/signifikan
Untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.	Pengumpulan data primer: melakukan survei dan melakukan wawancara dengan memberikan draft pertanyaan kepada informan yang mana merupakan subjek penelitian. Subjek penelitian ini antara lain keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Tulungagung. Selain itu, Pengumpulan data sekunder: penelitian kepustakaan berupa jurnal, skripsi, internet dan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung.	Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada informan terkait dengan tingkat literasi keluarga yang berhubungan dengan pendapatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri serta tentang bagaimana cara keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mengelola remitansi.	Mendokumentasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tingkat literasi keuangan syariah seperti data dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menganalisa pendapatan yang mereka peroleh di luar negeri dengan pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tanah air.
Untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Kecamatan Ngantru	Pengumpulan data primer: melakukan survei dan wawancara dengan memberikan draft pertanyaan kepada informan yang mana merupakan subjek penelitian. Subjek penelitian ini antara lain keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI),	Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara kepada informan baik kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan juga Pemerintah Kecamatan Ngantru ataupun Pemerintah Kabupaten	Mendokumentasikan hasil wawancara yang mana akan menemukan output berupa hasil remitansi yang digunakan untuk mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) oleh keluarga Pekerja Migran

		<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> -Peran pemerintah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> melalui keluarga PMI.
--	--	--

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga di antaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau interpretasi data.

1. Reduksi Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga di antaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau interpretasi data.

Analisa data penelitian ini pada tahap reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan yang menajamkan, menggolongkan,

Analisa data penelitian ini pada tahap reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan yang menajamkan, menggolongkan,

Adapun faktor yang melatarbelakangi peneliti dalam mengambil objek keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada penelitian ini diantaranya karena banyaknya masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), PMI menjadi faktor penting dalam pembangunan negara yang mana sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah pertambangan dan minyak bumi, minimnya pengetahuan keluarga PMI dalam mengelola remitansi serta rendahnya literasi keuangan syariah keluarga PMI di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

[illegible]

3. Kesimpulan atau Verifikasi

[illegible]

aktivitasnya. Selain itu peneliti juga akan memberikan pertanyaan atau gambaran terhadap literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah akan muncul sebuah inti pokok bahasan yang mana selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang diinginkan oleh peneliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau sebelumnya masih belum terarah.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti membagi dalam 5 (lima) BAB, yang mana setiap BAB terdiri dari beberapa Sub BAB sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

BAB I Pendahuluan, dalam BAB pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada BAB ini memuat teori tentang literasi keuangan syariah, dana remitansi, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin kesatu tentang

BAB III Gambaran Umum Penelitian, dalam BAB ketiga ini berisi tentang data penelitian yang memuat deskripsi data yang mana berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, data informan dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI), informan dari pemerintahan desa ataupun kecamatan hingga kabupaten, serta hasil penelitian berupa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan literasi keuangan syariah terhadap pengalokasian gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI).

[illegible]

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, dewasa ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha. Sebagai pelaku ekonomi, manusia selalu terlibat dengan kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, hingga distribusi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Oleh karena itu, perlunya pemahaman dan pengetahuan bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan mutu kinerjanya. Tidak sedikit dari masyarakat yang kurang memahami pola ekonomi mereka, sehingga menyebabkan ketidakseimbangannya kegiatan produksi dan konsumsinya. Pada sektor perekonomian inilah yang dapat menentukan keberlangsungan hidup masyarakat.

Kegiatan ekonomi berbanding lurus dengan sistem keuangan masyarakat. Saat ini di Indonesia sedang berusaha meningkatkan sistem ekonomi syariah guna meningkatkan keuangan syariah yang inklusif. Dengan adanya lembaga keuangan syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berinvestasi halal dan menjauhi segala investasi haram. Sehingga dalam hal ini, peneliti mengambil studi kasus dengan mengangkat judul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”.

Berikut ini pemaparan peneliti tentang beberapa teori yang dibahas adalah sebagai berikut:

Dengan berpedoman prinsip syariah dapat terhindar dari hal yang dilarang oleh agama. Terlebih lagi bagi keluarga Pekerja Migran (PMI) yang selalu mendapatkan uang secara rutin dari luar negeri.

Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1, Calon Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pekerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kota atau Kabupaten yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menejer di luar wilayah Republik Indonesia. Keluarga Pekerja Migran

Dengan berpedoman prinsip syariah dapat terhindar dari hal yang dilarang oleh agama. Terlebih lagi bagi keluarga Pekerja Migran (PMI) yang selalu mendapatkan uang secara rutin dari luar negeri.

Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1, Calon Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pekerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kota atau Kabupaten yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menejer di luar wilayah Republik Indonesia. Keluarga Pekerja Migran

Dengan berpedoman prinsip syariah dapat terhindar dari hal yang dilarang oleh agama. Terlebih lagi bagi keluarga Pekerja Migran (PMI) yang selalu mendapatkan uang secara rutin dari luar negeri.

Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1, Calon Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pekerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kota atau Kabupaten yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menejer di luar wilayah Republik Indonesia. Keluarga Pekerja Migran

Dengan berpedoman prinsip syariah dapat terhindar dari hal yang dilarang oleh agama. Terlebih lagi bagi keluarga Pekerja Migran (PMI) yang selalu mendapatkan uang secara rutin dari luar negeri.

Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1, Calon Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pekerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah di Kota atau Kabupaten yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menejer di luar wilayah Republik Indonesia. Keluarga Pekerja Migran

Sebagai negara hukum, setiap warga Negara Indonesia harus menaati peraturan yang ada dan mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lainnya tanpa ada perbedaan (*equality before the law*). Perlindungan terhadap buruh atau pekerja adalah kewajiban bagi suatu negara dalam melindungi warga negaranya. Hak-hak setiap warga negara harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan, yang mana dapat melindungi mereka selama bekerja baik di dalam negeri atau luar negeri.

Sebagian dari masyarakat Indonesia melakukan migrasi ke luar negeri atau migrasi Internasional atau migrasi perburuhan untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih baik. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil hingga mereka yang memiliki keahlian khusus. Organisasi Perburuhan

Internasional (*International Labour Organization / ILO*) mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan mendapatkan pekerjaan, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau migrasi Internasional mempunyai keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan demografi dalam suatu negara. Ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pertumbuhan populasi yang tinggi maka akan menyebabkan sulitnya perekonomian negara dalam menyerap tenaga kerja yang besar. Beberapa alasan untuk memecahkan ketenagakerjaan yaitu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Untuk membekali Pekerja Migran Indonesia (PMI), perlu adanya pemahaman tentang keuangan yang disebut dengan literasi keuangan.

Menurut Wahyunita (2019: 20-21), literasi banyak dipelajari secara luas dalam berbagai bidang, termasuk tentang perilaku konsumen. Literasi berhubungan dengan tingkat pengetahuan yang mana akan mempengaruhi beberapa hal pada perilaku seseorang. Pengetahuan atau literasi merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap orang. Literasi keuangan merupakan kebutuhan yang mendasar akan seseorang tidak kesulitan dalam mengatur keuangan mereka.

Literasi keuangan dapat diartikan menjadi melek keuangan oleh beberapa pakar literasi. Menurut OECD-INFE, menjelaskan bahwa melek keuangan sebagai berikut; “*A combination of awareness, knowledge, skill,*

Sedangkan literasi keuangan syariah adalah perluasan dari literasi keuangan yang mana diantaranya adalah pengelolaan uang dan harta (menabung untuk masa depan dan dana darurat), aspek perencanaan keuangan masa depan (dana pensiun, investasi, asuransi), aspek bantuan sosial (zakat, infaq, wakaf, shodaqoh). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), literasi keuangan syariah adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk menambah kemampuan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) masyarakat luas agar mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

[illegible]

Selanjutnya yang *keempat* adalah kemaslahatan: seperti halnya sistem ekonomi Islam yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudharatan. Program literasi keuangan syariah harus membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. *Kelima*, kolaborasi: program literasi keuangan harus melibatkan seluruh *stakeholders* syariah serta pemerintah yang bersama-sama dalam perencanaan dan implementasi.

Sehingga dapat diartikan bahwa remitan menjadi komponen penting dalam meningkatkan mobilitas pekerja dengan proses pembangunan di daerah asal. Besarnya gaji yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia

(PMI) di luar negeri tergantung pada jenis pekerjaan yang ditekuni. Adapun pekerjaan formal mempunyai gaji lebih tinggi daripada pekerjaan informal. Pekerjaan formal meliputi buruh pabrik, perkebunan atau pertanian, maupun proyek konstruksi, sedangkan pekerjaan informal bekerja sebagai penatalaksana rumah tangga (*domestic helper*). Ada pula kelompok pekerja profesional hanya sebesar 1% yang meliputi konsultan, akuntan, guru atau dosen, tenaga medis (Sari, 2016:53).

Menurut Diblyantoro dan Alie (2014: 319) bahwa pemanfaatan remitan produktif meliputi biaya pendidikan, pembelian tanah, usaha, sumbangan dan tabungan. Sedangkan, penggunaan remitan konsumtif meliputi penggunaan yang berorientasi pada konsumsi jangka pendek meliputi konsumsi, pembangunan atau renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor dan elektronik. Dan pemanfaatan remitan sosial meliputi bidang pendidikan, pemanfaatan keahlian, berpartisipasi dalam politik desa. Sehingga bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dapat memenuhi semua kebutuhan keluarganya dapat dikatakan berhasil di luar negeri.

Keberhasilan beberapa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri menyebabkan migrasi Internasional berulang. Adapun empat faktor dominan yang menyebabkan migrasi Internasional berulang antara lain (1) Penghasilan selama bekerja di luar negeri yang dikirim ke daerah asal hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi; (2) Mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sulit beradaptasi dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah asal

terutama keterbatasan kesempatan kerja dan upah yang rendah; (3) Keterbatasan kemampuan berwirausaha dan; (4) Keberadaan jaringan sosial yang mendukung terjadinya migrasi Internasional berulang (Noveria, 2017: 25).

Sehingga, meskipun perbedaan pengupahan atau pemberian gaji pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri merupakan hal yang biasa. Karena setiap perusahaan atau instansi atau lembaga lain atau rumah tangga pasti ingin merekrut pekerja yang mempunyai *skill* untuk dapat bekerjasama dengannya. Upah atau gaji yang dikirimkan akan dikirim ke daerah asal yang mana pasti melewati lembaga keuangan untuk mengirimkannya. Sebagai warga negara yang menggunakan jasa lembaga keuangan, perlunya untuk mengetahui apa saja tentang lembaga keuangan yang digunakan. Sehingga, dalam menggunakan salah satu produk dari lembaga keuangan tidak akan salah atau tertipu dengan transaksi yang tidak sah.

Negara dengan jumlah penduduk muslim sebagai mayoritas ini perlu mengetahui lembaga-lembaga keuangan syariah atau Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan literasi keuangan syariah sebagai acuan terbentuknya pribadi yang mempunyai ketaatan dalam menjalankan syariat Islam. Tingkat literasi keuangan syariah pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat diketahui dari keseharian dan bagaimana cara mereka mengetahui keuangan syariah yang dimiliki. Apakah orang tersebut mempunyai literasi keuangan syariah tinggi, sedang atau bahkan rendah.

Tujuan jangka panjang literasi bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

Tujuan (*maqhasid*) dari literasi keuangan syariah adalah supaya masyarakat luas dan konsumen dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengetahui manfaat dan risikonya, memahami hak dan kewajiban serta meyakini produk dan jasa keuangan syariah dipilih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan. Tujuan utama dalam mengelola keuangan sesuai syariat Islam untuk kemashlahatan dunia dan akhirat.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۚ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ ۚ فَلَهُ ۥ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة : ٢٧٥﴾

Allazīna ya`kulūnar-ribā lā yaqumūna illā kamā yaqumullażī
yatakhabbatuḥusy-syaiṭānu minal-mass, żālīka bi`annahum qālū
innamal-bai'u mişlur-ribā, wa aḥallallāḥul-bai'a wa ḥarramar-ribā,
fa man jā'ahū mau'izatum mir rabbihī fantahā fa laḥū mā salaf, wa
amruhū ilallāḥ, wa man 'āda fa ulā`ika aş-ḥābun-nār, hum fīḥā
khālidūn

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S: Al Baqarah 2:275)

Bagi masyarakat Indonesia tujuan pembangunan literasi keuangan syariah sangat dibutuhkan, diantaranya dapat meningkatkan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang literasi keuangan syariah. Dengan memahami literasi keuangan syariah, masyarakat akan lebih mengenal produk-produk keuangan syariah dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Dan juga masyarakat akan lebih cerdas dan mampu memilih investasi yang halal dan menguntungkan, karena saat ini banyak investasi yang bersifat *gharar* yang menyebabkan kerugian.

[illegible]

mengubah perilakunya dalam mengelola atau melakukan perencanaan keuangan (*financial planning*). Masyarakat akan dapat lebih mengatur keuangan mereka baik pemasukan hingga pengeluaran yang diperoleh dari jerih payah mereka.

Selain itu, manfaat-manfaat dari literasi keuangan syariah diantaranya adalah semakin banyaknya produk keuangan baru yang terus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu bagi masyarakat untuk semakin melek terhadap keuangan formal. Keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu hal yang masih tergolong baru dibandingkan dengan keuangan konvensional. Beberapa tahun terakhir, perkembangan keuangan syariah masih tergolong lambat, salah satunya adalah minimnya edukasi keuangan syariah di masyarakat sebagai bentuk upaya meningkatkan literasi keuangan syariah. Sehingga masyarakat masih belum mengetahui secara penuh manfaat pentingnya keuangan syariah di Indonesia.

Bagi industri keuangan, dengan mengetahui literasi keuangan syariah dapat semakin meningkatkan potensi transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS). Sehingga menimbulkan potensi keuangan yang besar dan dapat meningkatkan keberlangsungan transaksi keuangan syariah pada masyarakat. Selain itu, dengan mengetahui literasi keuangan syariah dapat memotivasi Lembaga

Jasa Keuangan Syariah (LJKS) untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah sesuai kebutuhan masyarakat.

Mengenalkan produk dan jasa keuangan syariah pada masyarakat diharapkan dapat semakin memahami manfaat dari pentingnya keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan tugas yang berat dimana hingga saat ini masih sedikit dari industri keuangan syariah yang memperkenalkan keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat.

Bagi masyarakat, manfaat mengetahui literasi keuangan syariah adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor riil, karena semua dana syariah diperuntukkan bagi sektor riil. Sehingga dengan literasi keuangan syariah, masyarakat dapat mengetahui manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan dengan baik sehingga dapat terhindar dari investasi tidak jelas.

Meningkatnya minat masyarakat menabung dan berinvestasi secara syariah, diharapkan perekonomian Indonesia semakin stabil karena sistem keuangan syariah secara tegas melarang adanya kegiatan riba dan maysir (spekulasi) yang dapat merugikan masyarakat. Dan juga masyarakat dapat melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik.

Bagi ekonomi makro, manfaat literasi keuangan syariah adalah semakin banyak masyarakat yang *well literate* dalam

lembaga keuangan syariah. Pengetahuan keuangan telah terbukti mempunyai dampak yang signifikan terhadap manajemen keuangan dan lebih konsisten ketika terjadi berbagai macam kebijakan digunakan (Sarah, 2009). Seseorang yang mempunyai pengetahuan keuangan lebih cenderung berperilaku keuangan dengan cara-cara yang bertanggungjawab secara keuangan (Hilgert et al, 2003).

Secara teoritis, pengetahuan keuangan tentang bagaimana pasar keuangan beroperasi harus menghasilkan individu yang membuat keputusan lebih efektif. Pengetahuan mengacu pada apa yang individu ketahui tentang masalah keuangan mereka, diukur dengan tingkat pengetahuan mereka tentang berbagai konsep keuangan pribadi. Pengetahuan keuangan tidak hanya mampu membuat seseorang lebih bijak dalam menggunakan keuangan, akan tetapi juga memberi manfaat ekonomi. Sehingga seseorang mempunyai pengetahuan keuangan yang baik akan mampu menggunakan uang sesuai dengan apa yang ia butuhkan (Widyaningrum, 2018: 19-20).

Menurut Diana Djuwita dan Ayus Ahmad (2018: 110), beberapa indikator dapat digunakan untuk menilai tingkat literasi keuangan syariah adalah kepemilikan rekening pada lembaga keuangan syariah. Adapun indikator-

- Pengetahuan umum keuangan syariah
- Tabungan dan pembiayaan
- Investasi syariah
- Asuransi syariah.

Financial management behavior adalah kemampuan seseorang dalam (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan) dana keluar sehari-hari (Purwidiyanti, 2016: 142). Menurut Soetiono dan Setiawan (2018:47) Perilaku keuangan atau *Financial Behavior* berhubungan dengan tujuan menggunakan produk dan layanan jasa serta upaya untuk mencapai tujuan keuangan syariah. Perilaku keuangan juga berhubungan bagaimana seseorang memperlakukan, mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan yang ada. Selain itu, mempunyai perilaku keuangan cenderung efektif dalam menggunakan uang seperti membuat anggaran, menghemat uang, mengontrol belanja, berinvestasi serta membayar kewajiban tepat waktu (Nababan dan Sadalia, 2012).

- a. Membayar tagihan tepat waktu
- b. Membuat anggaran pengeluaran dan belanja
- c. Mencatat pengeluaran dan belanja
- d. Menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga
- e. Menabung secara periodik
- f. Membandingkan harga antar toko atau swalayan untuk melakukan suatu pembelian.

Berkaitan dengan kemampuan menghitung produk dan jasa lembaga keuangan, seperti menghitung bunga,

mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Acara tersebut dihadiri oleh sekurangnya 193 kepala negara hadir termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turut berpartisipasi dalam mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 ini telah menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000-2015 pada 2016 lalu.

Menurut Hoelman (2016: 9), tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) berisi 17 tujuan, 169 target pembangunan dan 241 indikator serta 5 pondasi utama yang terdiri dari manusia (*people*), planet (*planet*), kesejahteraan (*prosperity*), perdamaian (*peace*) dan kemitraan (*partnership*) yang diharapkan dapat mengakhiri permasalahan mengenai kemiskinan, pencapaian kesetaraan, mengatasi perubahan iklim sewaktu-waktu. Program SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik dalam sisi kualitatif (mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada pada program (MDGs) maupun kuantitatif yang menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasaran.

Sehingga program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini adalah program pembangunan global yang dibentuk dengan mengedepankan prinsip *no one left behind* (tidak ada yang tertinggal). Program SDGs ini dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi

Salah satu negara yang masih banyak masyarakat miskin adalah Indonesia yang saat ini masih menjadi negara berkembang. Pentingnya sebuah literasi keuangan syariah pada masyarakat muslim terbesar ini untuk mengatur segala keuangan pribadi mereka, khususnya bagi mereka yang jauh dari keluarga seperti bekerja ke luar negeri. Indonesia sendiri mempunyai jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikatakan cukup banyak. Apalagi saat ini semakin meningkatnya lembaga keuangan syariah yang ada dengan mengenalkan produk-produk syariah unggulan mereka. Sayangnya masih belum merata pemahaman masyarakat khususnya para keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengelola keuangan dari hasil remitansi.

[illegible]

Bagi masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) mayoritas adalah golongan keluarga menengah ke bawah. Mereka yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah jalan alternatif untuk mendapatkan uang lebih banyak dibandingkan dengan bekerja di sawah atau sebagai nelayan di tanah air. Yang mana gaji di persawahan tidak menentu, semua tergantung musim, panen yang dilakukan juga tidak setiap hari, belum lagi dengan hama yang menyerang tanaman di sawah.

Tidak mudah bagi banyak orang yang ingin mendapatkan pekerjaan sesuai pada *passion*nya. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu alasan pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang semakin besar di Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran menimbulkan masalah-masalah yang signifikan bagi negara, sehingga perlu adanya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Pada hakikatnya pengiriman PMI ke luar negeri dapat juga mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Memastikan pendidikan yang inklusif dan bermutu serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup merupakan tujuan *Sustainable Development Goals*

Sehingga pengelolaan keuangan berdasarkan syariat Islam sangat baik bagi keluarga. Ketika mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi, mereka akan dapat dengan mudah mengelola keuangan khususnya bagi para keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peran lembaga keuangan syariah juga sebagai jembatan pada seseorang yang ingin mengelola keuangan yang dimiliki sesuai dengan syariat Islam.

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang kedelapan adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja yang merata dan produktif serta mempunyai pekerjaan yang layak bagi semua orang. Tujuan ini memperbaiki secara progresif perekonomian di negara-negara hingga tahun 2030. Efisiensi sumber daya global dalam hal konsumsi dan produksi serta berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan. Sesuai dengan kerangka kerja 10 tahun program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan dipelopori negara-negara maju.

Tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif, mempunyai pekerjaan yang layak bagi laki-laki dan perempuan termasuk untuk kaum muda, kaum miskin hingga orang disabilitas serta kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai sama. Selain itu juga, melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan migran dan pekerja dalam situasi genting. Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan meluaskan akses terhadap perbankan, asuransi dan layanan pendanaan untuk semua orang.

Beberapa orang memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) daripada menjadi pengangguran di negara sendiri. Dengan upah atau gaji yang didapat lebih tinggi daripada bekerja di tanah air. Sehingga hal tersebut dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya dan juga untuk ditabung. Selain untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri, PMI dianggap salah satu sumber pendapatan devisa negara. Maka dari itu, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sering disebut sebagai pahlawan devisa karena menambah mata uang asing dikas negara. Pada umumnya PMI akan mengirimkan sebagian penghasilannya ke tanah air.

2.2.1 Peranan dan Kontribusi PMI Terhadap Perekonomian dan Pembangunan

Tahun 2016, Bank Indonesia mencatat total kontribusi remitansi PMI mencapai US\$8,9 miliar atau setara dengan Rp 118 triliun. Realisasi ini setara dengan satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, berarti hasil dari remitansi PMI melebihi capaian program amnesti pajak di tanah air. Hal tersebut dapat digunakan untuk pembangunan negara. Maka dari itu, PMI mempunyai peranan besar dalam perekonomian dan pembangunan negara.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai peran penting dalam kemajuan perekonomian negara ini. Ketika PMI mengirimkan uang ke tanah air terjadi sumbangan devisa negara karena para PMI harus membeli rupiah dengan menggunakan mata uang asing tersebut. Semakin banyak uang asing yang ditukarkan dengan rupiah maka keuntungan bagi negara sendiri antara lain: 1) bertambahnya simpanan uang asing yang menjadi sumber devisa, 2) kebutuhan terhadap rupiah meningkat sesuai hukum “*supply and demand*” maka nilai mata uang rupiah akan menguat dibanding mata uang asing.

Devisa menjadi salah satu pilar yang menunjukkan kekuatan ekonomi sebuah negara. Semakin tinggi devisa yang dikantongi sebuah negara, maka semakin kaya kekuatan ekonomi

negara tersebut. Sumbangsih para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat dipandang sebelah mata, apabila ditinjau dari jumlah remitansi atau uang kiriman PMI dari luar negeri. Sebagai perbandingannya, remitansi dari buruh migran lebih tinggi daripada jumlah dana yang dikumpulkan pemerintah melalui program amnesti pajak.

Devisa sangat penting bagi negara. Dengan adanya devisa, negara dapat membeli barang dari luar negeri atau mengimpor barang, membayar hutang pokok maupun bunga utang luar negeri, membiayai kegiatan-kegiatan perdagangan yang ada di luar negeri, membiayai perwakilan luar negeri seperti duta besar atau konsultan, serta membiayai atlit-atlit mengikuti suatu pertandingan, studi banding dan masih banyak lagi.

DATA PENELITIAN

Pada BAB III ini menjelaskan tentang keadaan masyarakat yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu mulai dari letak daerah, luas wilayah, keadaan penduduk hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, informasi mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta pemerintah yang memberikan argumen atau pendapat untuk menunjang penelitian ini.

Profil atau gambaran umum Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ini, menggambarkan keadaan Kecamatan Ngantru secara umum baik dari keadaan wilayah serta keadaan penduduk yang ada didalamnya.

3.1.2 Luas Wilayah

[illegible]

Tabel 3.5 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung

No	Desa	Luas Wilayah (km^2)
1	Pakel	2,51
2	Pucung Lor	3,03
3	Srikaton	2,81
4	Padangan	4,61
5	Pinggirsari	3,18
6	Bendosari	2,50
7	Ngantru	2,07
8	Pulerejo	1,98
9	Pojok	4,34
10	Kepuhrejo	2,62
11	Mojoagung	1,43
12	Batokan	2,12
13	Banjarsari	3,67
TOTAL		36,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2019

Ketiga belas (13) desa di Kecamatan Ngantru yang mempunyai wilayah terluas adalah Desa Padangan dengan luas 4,61 km^2 , sedangkan wilayah terkecil adalah Desa Mojoagung dengan luas 1,43 km^2 . Apabila ditinjau dari pusat Kecamatan Ngantru, lokasi Desa Pakel mempunyai jarak paling jauh yaitu 9,5 km dari Kecamatan Ngantru. Ditinjau dari penggunaan lahannya, sebagian besar wilayah atau lahannya merupakan sawah pertanian yang mempunyai luas 1.173,23 Ha, dengan menggunakan pengairan secara teknis seluas 802,34 Ha dan selebihnya tadah hujan. Sedangkan untuk wilayah perumahan dan perkarangan

seluas 1.308,35 Ha dan sisanya tegal atau ladang, tanah lapang, jalan dan lain-lainnya.

Keadaan penduduk menggambarkan kondisi wilayah yang mana berdomisilinya masyarakat yang terdapat dalam suatu komunitas menunjukan kondisi dari suatu masyarakat. Keadaan penduduk di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dapat ditinjau dari jumlah dan kepadatan penduduk, pendidikan, mata pencaharian masyarakat sekitar dan kepercayaan penduduk.

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 13 desa, 113 Rukun Warga (RW) dan 362 Rukun Tetangga (RT). Desa yang mempunyai RT terbanyak adalah Desa Padangan dan Desa Bendosari, yang mana masing-masing sebanyak 51 RT. Sedangkan yang mempunyai RT paling sedikit adalah Desa Mojoagung yaitu sebanyak 10 RT. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung berjumlah 56.042 jiwa, yang mana jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 27.976 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan sejumlah 28.066 jiwa. (Tabel 1.1 Data Jenis Kelamin Penduduk di Kecamatan Ngantru)

umber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

2019

Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul dan maju. Sangat dibutuhkan tenaga pendidik yang kompeten untuk membentuk karakter anak bangsa. Di Kecamatan Ngantru sendiri masih minim Sekolah Menengah Atas (SMA), karena mayoritas SMA berada di pusat kota, sehingga membutuhkan waktu 15-30 menit untuk pergi ke kota. Disisi lain banyaknya Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) sangat mendominasi di Kecamatan Ngantru.

Masyarakat di Kecamatan Ngantru mempunyai
bermacam-macam pekerjaan atau mata pencaharian
diantaranya adalah:

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2019

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Ngantru didominasi oleh petani. Karena, di Kecamatan Ngantru mempunyai lahan sawah dan ladang yang sangat luas. Posisi mata pencaharian lain yang banyak ditekuni oleh masyarakat adalah perdagangan, hotel dan restoran. Banyak dari masyarakat yang memilih untuk berdagang demi menyambung hidup yang lebih baik. Ataupun membuka sebuah warung dan restoran yang mana setiap orang pasti membutuhkannya.

Penduduk di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung mempunyai keberagaman kepercayaan yang berbeda-beda. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan kepercayaan atau agama, meliputi:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja (Jiwa)
1	Islam	55.139
2	Katolik	29
3	Kristen	295
4	Hindu	-
5	Budha	-
TOTAL		55.627

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh gambaran umum bahwa jumlah penduduk dengan kepercayaan agama Islam mendominasi dengan jumlah 55.139 jiwa. Sedangkan tidak ada penduduk yang beragama Hindu dan Budha.

mempunyai sebuah toko dirumah untuk menambah penghasilan. Beliau tinggal bersama anaknya yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

2. Informan 2 adalah orang tua dari salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau tinggal dirumah sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anaknya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama 5 tahun. Saat ini Informan 2 tinggal bersama anak pertama dan menantunya serta anak bungsunya. Saat ini, anak bungsunya bekerja sebagai asisten bidan.
3. Informan 3 adalah istri dari salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga. Suaminya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama 5 tahun. Saat ini Informan 3 tinggal bersama ketiga anaknya dirumah.
4. Informan 4 adalah suami dari salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Saat ini, beliau bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan istrinya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama 7 tahun. Informan 4 tinggal bersama ketiga anaknya dirumah.
5. Informan 5 adalah istri dari salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan suaminya bekerja

2. Informan 9 adalah Staf PMD di kantor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

3.3 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diambil dari informasi yang disampaikan beberapa informan baik dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.

1. Implementasi Peran Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemiskinan merupakan masalah besar bagi setiap pemerintah dalam upaya membangun suatu bangsa. Seperti pada tujuan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah meningkatkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, Sumber Daya Manusia (SDM) seharusnya diimbangi dengan sarana pendidikan dan tenaga guru yang memadai. Hal tersebut dapat membantu dalam penanganan masalah ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung adalah di sektor pertanian. Luasnya daerah persawahan menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang untuk

Tulungagung, sehingga memilih untuk mengikuti jalur ilegal yang dirasa prosesnya lebih cepat dan mudah. Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah menjadi pilihan setiap anggota keluarga. Hal tersebut sudah melalui keputusan bersama dengan mempertimbangkan segala risiko yang ada.

Adanya salah satu anggota keluarga yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), diharapkan keadaan perekonomian keluarga tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemanfaatan remitansi menjadi indikator penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Remitansi dalam konteks migrasi di negara-negara berkembang sebagai upaya migran dalam menjaga keberlangsungan ikatan sosio-ekonomi di daerah asal, meskipun secara geografis mereka terpisah jauh. Selain migran mengirim remitan karena mengenai moral maupun sosial, mereka juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Hasil dari remitan yang lebih sering berupa uang tersebut untuk keluarga di tanah air akan dikirimkan melalui lembaga keuangan yang ada di negara tujuan. Lembaga keuangan yang telah dipercayai oleh nasabah menjadi faktor penting dalam keamanan dan kepercayaan. Remitansi yang dikirimkan ke Indonesia bisa di transfer pada bank konvensional ataupun bank syariah yang ada di Indonesia. Membumikan pengetahuan tentang bank syariah yang ada di Indonesia saat ini menjadi minat tersendiri bagi masyarakat untuk membuat

tabungan syariah dalam kehidupan mereka. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah masyarakat sudah benar-benar memahami tentang keuangan syariah atau tidak.

Kemampuan untuk mengelola keuangan lebih baik setiap individu berbeda. Dibutuhkan pemahaman yang khusus supaya keuangan lebih terkontrol antara pemasukan dan pengeluaran. Bagi masyarakat sendiri tidak mudah mengatur keuangan secara teratur. Perlunya bantuan dari lembaga keuangan bagi masyarakat yang dapat memberikan solusi serta saran atas keuangan mereka. Seperti halnya seperti hasil wawancara dengan tujuh orang informan yang dilakukan peneliti bahwa rata-rata keluarga mereka yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) minimal lima tahun di luar negeri.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 melalui wawancara langsung bahwa:

“Suami saya sudah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) hampir 10 tahun ini mbak di Malaysia. Alhamdulillah setiap hari selalu kasih kabar, kadang telpon kadang juga *video call*”

Awal perjalanan yang berat ketika ditinggalkan oleh keluarga untuk bekerja ke luar negeri. Penyesuaian kehidupan yang tidak seperti biasanya menyebabkan beban psikis dan rasa ingin selalu bersama keluarga pun ada. Akan tetapi, apabila tidak bekerja sebagai salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan sulit untuk meningkatkan

perekonomian keluarga sehingga sesama anggota keluarga harus saling memberikan dukungan.

Migrasi Internasional para Pekerja Migran Indonesia (PMI) diharapkan dapat mendapat penghasilan yang layak. Pengiriman dana atau gaji kepada keluarga yang ada di daerah asal merupakan sebuah kewajiban bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara tujuan. Pengiriman remitansi dilakukan tergantung situasi yang ada di sana ataupun kebutuhan yang ada di tanah air. Seperti yang diungkapkan oleh informan 2 yang mana selalu menerima remitansi dari anaknya. Beliau mengatakan bahwa:

“Iya, dia selalu mengirim uang ke rumah. Kadang sebulan sekali, dua bulan sekali hingga tiga bulan sekali. Ya tergantung kondisi di sana juga mbak. Setelah itu, saya mengambilnya ke bank.”

Remitansi yang telah dikirimkan dari luar negeri tersebut digunakan untuk keperluan di daerah asal. Baik digunakan untuk kebutuhan konsumtif ataupun digunakan untuk kebutuhan produktif. Untuk mengatur segala pengeluaran yang ada di tanah air, sudah menjadi tugas dari keluarga yang menerimanya. Bagaimana cara mereka memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Informan 3 menjelaskan bagaimana beliau mengatur remitansi dari suaminya. Melalui wawancara langsung beliau mengatakan bahwa:

“Kebutuhan sehari-hari ya untuk makan, beli jajan anak-anak, uang jajan sekolah, beli baju pas lebaran, juga baru renovasi rumah ini mbak.

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Informan 4, bagaimana beliau menggunakan dana remitansi tersebut yang dikirimkan oleh istrinya. Beliau mengungkapkan bahwa:

Remitansi menjadi hal terpenting dalam salah satu alasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di luar negeri. Apalagi saat ini Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung semakin banyak. Berdasarkan hasil wawancara, informan 6 mengungkapkan bahwa harapan untuk pemerintah adalah:

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung merupakan muslim. Sehingga perlu untuk mengenal keuangan syariah yang ada di Indonesia. Meskipun keuangan syariah masih dipandang rendah atau diacuhkan, akan tetapi suatu saat akan berkembang pesat apabila warga mengetahui keuntungan dari keuangan syariah tersebut.

“Tidak punya, hanya satu tabungan saja dan tidak pernah mengikuti apapun. Arisan pernah hanya kecil-kecilan, syariah-syariah gitu nggak ada mbak.”

Sama halnya dengan informan ke 6 dan ke 7 yang tidak mengetahui tentang keuangan syariah. Mereka hanya mengetahui keuangan konvensional. Disisi lain ada dua keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengetahui tentang keuangan syariah. Penggunaan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai menjadi kebiasaan mereka yaitu informan 1 dan informan 2.

Seperti halnya yang dinyatakan informan 1, bahwa:

[illegible]

Ia mengatakan bahwa:

Sama halnya diungkapkan oleh anak bungsu dari informan 2 juga menggunakan salah satu produk syariah. Ia mengatakan bahwa:

Sebenarnya saya sangat awam terhadap syariah. Kemarin teman saya mengajak membuka tabungan emas di Pegadaian Syariah tahun 2019 kemarin. Dia sedikit menjelaskan tentang tabungan tersebut. Dan akhirnya saya tertarik karena memang ada rasa ingin tahu. Kalau untuk pengiriman uang dari kakak saya, saya masih menggunakan tabungan konvensional, soalnya belum mengetahui bagaimana tabungan syariah itu.

Beberapa hal yang menyebabkan keluarga informan 1 dan informan 2 memutuskan menggunakan keuangan syariah untuk beberapa hal. Seperti yang diungkapkan oleh anak dari informan 1 yang telah menggunakan tabungan syariah, bahwa:

Kalau BNI Konvensional saya ambil sehari-hari. Sedangkan BNI Syariah saya gunakan untuk menyimpan uang, karena di BNI Syariah tidak ada pajak atau biaya administrasi atau potongan setiap bulannya jadi enak pakai BNI Syariah. Setiap ayah saya mengirim uang kepada ibu saya dan ibu saya memberikan uangnya kepada saya, dua tabungan ini saya fungsikan. Jadi, 70 persen saya masukan ke BNI Konvensional untuk kebutuhan sehari-hari karena ATM BNI Konvensional banyak dimana-mana. Sedangkan 30 persen dari pemberian ibu saya simpan di BNI Syariah, karena uang tidak akan berkurang sedikitpun. Apabila *nggak* gitu, saya *nggak* punya simpanan.

Iya istilahnya untuk investasi mbak, tabungan masa depan. Saya sedikit mengetahui tabungan emas yang katanya teman saya juga bisa dilakukan di pegadaian konvensional. Jadi nabung juga bisa, transfer juga bisa. Nabungnya itu ada minimalnya mbak, sebesar harga emas kalau tidak salah. Tentang bagi hasil saya kurang begitu paham. Pokoknya untuk investasi jangka panjang gitu.

Awalnya pas buat dulu saya bilang ke mbak CS nya mau buat tabungan *duh* apa ya mawadah, oh bukan. Tabungan *wadi'ah* maksudnya. Soalnya akad-akad yang digunakan banyak jadi saya taunya wadiah aja, sehingga kita hanya titip uang saja atau istilahnya nabung dan juga tidak ada potongan admin setiap bulannya. Untuk pembiayaan, saya belum pernah melakukannya. Jadi hanya nabung saja. Dulu saya mikir ngambil uang jauh apalagi bank syariah adanya di kota. Sedangkan rumah kita ada diujung utara Kabupaten Tulungagung. Ternyata setelah saya tanya-tanya bisa ngambil uang dimana saja, hanya saja nanti dapat denda sekitar 3.500an, ya bagi saya tidak masalah. Selain itu untuk menabung pun bisa di bank lain hanya saja tujuannya ke BNI Syariah. Kan sebenarnya sama, jadi kaya anaknya bank pusat atau bank induk gitu pas aku tanya-tanya dulu. Lalu melepaskan diri dari bank induk, ya karena programnya berbeda-beda.

“Dampaknya ya supaya aman dan tidak terjebak investasi yang tidak jelas. Saya kurang begitu paham sebenarnya, katanya kalo harga emas naik maka keuntungan juga naik.”

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat literasi keuangan syariah dinilai mempunyai pengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi. Kehadiran lembaga jasa keuangan syariah telah menarik perhatian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Upaya memperkenalkan layanan keuangan syariah telah dilakukan oleh perbankan syariah melalui berbagai kegiatan ditempat-tempat publik termasuk sekolah dan perguruan tinggi. Disisi lain, potensi dan pertumbuhan industri keuangan syariah sangat besar tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang industri keuangan.

Keuangan syariah di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar, namun rendahnya literasi keuangan syariah membuat potensi semakin kurang optimal. Program strategis harus dilakukan guna mengembangkan keuangan syariah, terutama optimalisasi promosi keuangan syariah dalam meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat. Tujuan literasi keuangan tidak hanya agar tercapai dengan optimal jika faktor eksternal lain tidak mendukung. Faktor eksternal berpotensi mempengaruhi keberhasilan literasi keuangan syariah antara lain: pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, komposisi penduduk usia produktif dan pemanfaatan teknologi informasi (OJK, 2016).

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang lembaga jasa keuangan syariah. Salah satunya para keluarga Pekerja

Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 7 yang saat ini bekerja pada Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung tentang semakin meningkatnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Tulungagung:

Sehingga untuk menyikapi banyaknya PMI yang sedang di luar negeri ataupun PMI purna dan keluarganya maka pemerintah membuat suatu program. Adapun peran pemerintah dalam pemberdayaan PMI,

[illegible]

itu perputaran uang di Tulungagung itu bagus atau disebut pahlawan devisa. Walaupun dibalik itu dampak sosialnya tentu saja berkurang, pencapaian, kehidupan yang glamor.

Sehingga ada beberapa solusi yang diungkapkan oleh informan 7 tentang fenomena banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), melalui wawancara langsung beliau mengatakan bahwa:

Dengan mendatangkan investor di Tulungagung, banyak perusahaan yang didirikan di Tulungagung, akhirnya mereka tidak perlu berangkat di luar negeri sudah bisa bekerja di Tulungagung. Tapi sayangnya UMR di Tulungagung tidak ada dua juta, sementara PMI itu yang dicari gaji besar. Itu sebetulnya kami sudah selalu sosialisasikan, tetapi kembali lagi pilihan.

Selain itu, informan 7 juga berpendapat tentang lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini. Karena sebagian masyarakat yang sudah mengenal tentang keuangan syariah. Melalui wawancara langsung, informan 7 mengungkapkan bahwa:

Kalo saya secara pribadi oke, lembaga keuangan syariah oke, saya juga orang Islam. Tetapi ini masih menjadi satu perdebatan bahwa keuangan syariah hanya *labeling* saja. Keuangan syariah masih *brand* saja. Memanfaatkan situasi, memanfaatkan syariah saja. Keuangan syariah yang betul betul syariah itu bagus. Tapi kalo hanya sekedar *brand* saja, *labeling* saja itu mengecewakan. Tapi saya merasakan sendiri, BMT dan sebagainya itu masih berbicara di akad tapi dibalik akad itu bila merugikan, menyulitkan, karena orang yang datang ke bank pasti orang butuh. Ketika dia butuh kepepet apalagi disodorkan kapan saja akadnya pasti akan siap.

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh informan 8 yang saat ini bekerja sebagai Staf PMD di kantor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, melalui wawancara langsung beliau mengatakan bahwa: Harapan untuk PMI pasti bisa mandiri bekerja di daerahnya sendiri dan tidak kembali keluar negeri dengan memberikan peluang dan

Selain itu, informan 8 juga mengungkapkan pendapat beliau mengenai literasi keuangan syariah pada masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

Namun, beliau mendukung dengan adanya peningkatan literasi keuangan syariah pada masyarakat, hal tersebut diungkapkan beliau bahwa:

Beliau juga menyambung pendapatnya, bahwa:

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Peran Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

100

Secara nasional, tingkat inklusi keuangan naik dari 67,8 persen menjadi 76,19 persen.

Literasi keuangan syariah atau literasi halal sebagai kemampuan seseorang dengan menggabungkan seperangkat pengetahuan, kesadaran dan keterampilan untuk membedakan antara yang halal dan haram serta produk dan layanan berdasarkan syariat Islam (Antara et al, 2016:198). Literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam kesuksesan atau kemajuan produk dan jasa layanan lembaga keuangan syariah yang saat ini ada termasuk di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung mempunyai beberapa lembaga keuangan syariah yang menangani masalah keuangan baik lembaga perbankan syariah atau lembaga non bank syariah.

Banyak hal yang menjadi problematika kurang berkembangnya lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Tulungagung, salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Merujuk pada teori yang terdapat pada BAB II tinjauan pustaka halaman 57-61 tentang komponen-komponen literasi keuangan syariah. Hal ini dapat menjadi bahan acuan untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah masyarakat khususnya pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Tulungagung ini. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya keluarga yang mencari nafkah di luar negeri demi meningkatkan perekonomian keluarga.

Keterkaitan antara literasi keuangan syariah dengan pemanfaatan remitansi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah bagaimana

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan pribadi ataupun keluarga berdasarkan syariat-syariat Islam. Hal tersebut dilakukan untuk mengatur keuangan agar lebih baik dan terstruktur. Sehingga untuk memanfaatkan remitansi dari luar negeri dapat dilakukan dari hal terkecil terlebih dahulu, seperti mengelompokkan atau membagi dana hasil remitansi untuk kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif.

Maka, perlunya peran dari lembaga keuangan syariah untuk mengelola dana remitansi para keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagai penyedia jasa, lembaga keuangan syariah mempunyai peran untuk memberikan pelayanan permodalan, jasa keuangan hingga konsultasi keuangan syariah. Sehingga, apabila masyarakat telah melek keuangan syariah maka semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan produk dan jasa lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mencapai kesejahteraan merupakan suatu hal yang diinginkan bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengetahui komponen keuangan yang berdasarkan syariat Islam. Komponen-komponen literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam menjawab semua permasalahan keuangan beberapa informan yang merupakan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, diantaranya:

1. Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)

Motivasi individu untuk hidup lebih baik dapat belajar dari pengalaman. Pengalaman dapat dipelajari dari pengalaman pribadi, teman, keluarga atau orang lain yang lebih berpengalaman sehingga dapat memperbaiki dalam proses pengelolaan, pengambilan keputusan maupun perencanaan investasi keluarga. Pengetahuan keuangan mampu memberikan manfaat pada perekonomian yang baik. Sehingga seseorang yang mempunyai pengetahuan keuangan yang baik dapat dikatakan mampu menggunakan uang sesuai apa yang ia butuhkan bukan apa yang ia inginkan.

Pengetahuan keuangan berlaku untuk siapa saja termasuk keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Pengetahuan keuangan juga dapat dilihat dari kemampuan dalam membuat keputusan keuangan (*financial skill*) dengan menggunakan alat keuangan (*financial tools*) seperti kartu kredit, kartu debit, produk asuransi dan lain-lain. Pengelolaan keuangan yang cerdas harus mempunyai pengetahuan keuangan yang tinggi dimana kegiatannya dapat berupa pencatatan dan penganggaran, perbankan dan penggunaan kredit, simpanan dan pinjaman, pembayaran pajak, membuat pengeluaran krusial, membeli dan mengerti asuransi, investasi dan rencana dana pension (Irza Desy Kurniawati, 2017: 3)

a. Pengetahuan Umum Tentang Keuangan Syariah

Sebagai keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) diharapkan mampu mengelola hasil remitansi dari keluarga yang bekerja di luar negeri. Hal itu menjadi tugas untuk memanfaatkan uang berdasarkan kebutuhan rumah tangga. Keluarga yang ada di tanah air harus dapat mengelola uang dengan penuh bertanggung jawab secara keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana seseorang secara bijak menggunakan uang dan memberi manfaat ekonomi.

[illegible]

salah ataupun awam dengan keuangan yang dimiliki dan juga tidak terjebak oleh transaksi keuangan yang tidak jelas.

Merujuk pada hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan terdapat pada BAB III halaman 83-98 tentang pengetahuan informan mengenai keuangan syariah yang dimiliki. Pengetahuan keuangan syariah pada setiap individu berbeda-beda baik pada lembaga perbankan syariah ataupun lembaga non bank syariah. Sehingga pengetahuan keuangan yang dimiliki menjadi indikator terbentuknya pribadi keuangan seseorang.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mengelola keuangan pribadi ataupun kelompok berdasarkan syariat Islam dengan menggunakan akad-akad tertentu. Hanya saja masih beberapa akad yang diketahui keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada lembaga keuangan syariah, sehingga belum sepenuhnya mengetahui akad-akad ataupun produk-produk yang ada pada lembaga keuangan syariah.

Seperti halnya informan 1 dan informan 2 sudah mengetahui lembaga keuangan syariah yang mereka miliki. Informan 1 yang mengetahui tentang lembaga perbankan syariah yang mana ia mempunyai salah satu produknya dan informan 2 yang mengetahui tentang lembaga keuangan non

bank syariah sesuai produk yang ia gunakan. Sedangkan informan 3 hingga informan 7 yang tidak paham mengenai lembaga keuangan syariah karena kelima informan tersebut hanya mempunyai tabungan pada perbankan konvensional.

Adanya bank syariah atau non bank syariah khususnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung juga mempengaruhi minat dan pengetahuan nasabah, akan tetapi di Kecamatan Ngantru sendiri tidak adanya bank syariah atau non bank syariah. Masyarakat hanya mengetahui adanya bank konvensional, sehingga pengetahuan akan bank syariah atau non bank syariah masih sangat minim sekali. Maka dari itu perlunya peran lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam pengenalan produk dan jasa keuangan pada masyarakat.

Informasi dan pengetahuan keuangan syariah penting dalam mengatasi masalah keuangan yang dapat diperoleh melalui pengalaman ataupun pendidikan, seminar tentang keuangan syariah, pelatihan, festival ekonomi syariah, pelatihan mengenai keuangan syariah, keluarga, teman dan pekerjaan. Pengetahuan keuangan syariah sangat mempengaruhi loyalitas dan keyakinan nasabah dalam menggunakan layanan jasa keuangan syariah.

Salah satu produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah adalah tabungan syariah. Simpanan yang berupa akad-akad syariah seperti akad *wadi'ah*, akad *mudharabah*, akad *murabahah* dan akad-akad lainnya serta penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Sedangkan pinjaman dalam syariah lebih dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam syariah harus mengikuti segala persyaratan yang ada dan menentukan akad sesuai dengan kesepakatan.

Beberapa produk unggulan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah ataupun non bank syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah termasuk keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini. Seperti halnya produk tabungan dan pembiayaan yang banyak digunakan oleh para nasabah. Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) ada yang menggunakan tabungan untuk transaksi karena dirasa cukup mudah dan sesuai kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa informan 1 dan informan 2 sudah mengetahui lembaga keuangan syariah yang mereka miliki. Informan 1 yang mengetahui tentang tabungan BNI syariah pada bank syariah dan informan 2 yang mempunyai tabungan emas pada pegadaian syariah. Hanya saja kedua

informan tidak mempunyai dan mengetahui pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yang mereka miliki. Sedangkan, informan 3 hingga informan 7 hanya mengetahui tabungan konvensional yang mereka miliki, karena mereka tidak mempunyai tabungan atau pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara pada BAB III halaman 81-94 yang mana diungkapkan oleh informan 1 bahwa hasil remitansi yang dikirimkan keluarga dari luar negeri sebagian disimpan pada tabungan syariah dan beberapa masih belum mempraktikannya. Akad yang digunakan dalam tabungan syariah adalah akad *wadi'ah* atau titipan. Akad *wadi'ah* pada bank syariah yaitu menitipkan atau menyimpan uangnya ke bank dan uang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

Selain menabung, informan 1 juga mengambil uang di bank ataupun di *Automated Teller Machine* (ATM). Pengambilan uang di ATM yang mana sesuai dengan jenis bank tidak akan dikenakan biaya administrasi. Sedangkan, apabila mengambil uang tidak sesuai dengan bank syariah tujuan akan dikenakan biaya administrasi. Seperti halnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung masih belum adanya bank syariah, sehingga apabila ingin mengambil uang tetapi tidak

Adanya biaya administrasi atau potongan per bulan tersebut menjadi hal yang tidak menyebabkan seseorang memutuskan untuk berhenti menggunakan tabungan syariah. Hal ini dikarenakan apabila dibandingkan dengan tabungan konvensional yang setiap bulan ada potongan administrasinya. Hasil dari remitansi yang dikirim keluarga dari luar negeri juga dapat disimpan pada tabungan syariah yang mana akan digunakan untuk tabungan masa depan.

Selain itu, tabungan syariah pada lembaga keuangan non bank syariah juga banyak digunakan oleh informan 2 seperti tabungan emas pada pegadaian syariah yang dimiliki salah satu keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Tabungan emas dengan minimal menabung sebesar Rp 10.000,00 ini yang nanti akan dikonversikan ke harga emas. Sehingga dana yang disimpan nanti akan berubah menjadi bentuk gram sesuai harga emas.

Melakukan penyimpanan yang dilakukan saat ini dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih banyak untuk jangka panjang atau yang sering disebut investasi ini menjadi keinginan setiap orang. Investasi banyak bentuknya baik pada

Melakukan penyimpanan yang dilakukan saat ini dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih banyak untuk jangka panjang atau yang sering disebut investasi ini menjadi keinginan setiap orang. Investasi banyak bentuknya baik pada

sektor keuangan, properti, bisnis, pendidikan, logam mulia seperti emas, jaringan dan lain sebagainya. Investasi syariah yang sering dilakukan masyarakat adalah investasi pada sektor keuangan. Investasi syariah ini berupa investasi saham syariah, obligasi syariah, deposito syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah dan lain sebagainya.

Produk investasi lebih ke arah peningkatan aset jangka panjang pada seseorang, sehingga tidak bisa untuk kepentingan mendadak atau mendesak. Investasi berbeda dengan tabungan. Tabungan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan dan persyaratannya relatif mudah. Investasi mempunyai pertumbuhan dan peningkatan aset yang cepat. Selain itu, mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada tabungan, tetapi dapat memberikan banyak uang.

Saat ini yang digunakan oleh informan 2 adalah investasi emas. Investasi emas yang dilakukan pada pegadaian syariah ini diharapkan dapat membawa manfaat dikemudian hari. Selain itu kebutuhan yang mendesak juga dapat digunakan untuk bekal dimasa tua nanti. Investasi emas yang dapat dimulai dari jumlah kecil terlebih dahulu, selebihnya tergantung bagaimana seseorang dalam menabungnya. Sayangnya, investasi emas masih belum sepenuhnya rutin dilakukan oleh informan 2, karena faktor lokasi pegadaian yang jauh dari rumah.

Risiko-risiko yang dihadapi setiap pemilik keuangan pasti selalu diantisipasi. Bahkan seseorang meramal segala bentuk risiko yang mungkin akan terjadi. Salah satu produk untuk mengurangi risiko tersebut adalah asuransi syariah. Asuransi syariah sebagai alat untuk mengurangi risiko keuangan supaya kerugian individu dapat diperkirakan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah pada asuransi syariah berupa usaha tolong menolong (*ta'awun*) dan saling melindungi (*tafakul*) antar peserta melalui pembentukan dana *tabaru'*.

2. Perilaku Keuangan (*Financial Behaviour*)

Perilaku keuangan berhubungan dengan cara seseorang mengelola, memperlakukan dan menggunakan sumber daya keuangan yang ia miliki. Perilaku keuangan juga berhubungan dengan bagaimana seseorang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan syariah serta upaya untuk mencapai tujuan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, informan 1 dan informan 2 yang telah menggunakan produk berupa tabungan syariah. Hal tersebut bertujuan untuk simpanan jangka pendek maupun panjang, karena untuk dipergunakan dikemudian hari.

Remitansi dapat mempengaruhi uang beredar di daerah darimana remitansi berasal, sehingga tingkat daya beli masyarakat terhadap barang konsumtif semakin meningkat. Penggunaan barang atau jasa konsumtif yang banyak harus diimbangi dengan penggunaan barang atau jasa produktif (Haryati: 388). Adapun kebutuhan produktif meliputi biaya pendidikan, pembelian tanah, usaha, sumbangan dan tabungan. Sedangkan, kebutuhan konsumtif diantaranya untuk memenuhi sandang, pangan, pembangunan atau renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor dan elektronik (Dibyantoro dan Alie, 2014: 319)

Biasanya ciri individu yang mempunyai perilaku keuangan yaitu membuat anggaran, menghemat uang, mengontrol belanja, investasi serta membayar kewajiban tepat waktu. Seperti yang

a. Membayar Tagihan Tepat Waktu

b. Membuat Anggaran Pengeluaran dan Belanja

[illegible]

c. Mencatat Pengeluaran dan Belanja

Terkadang masih banyak orang yang menghiraukan akan hal tersebut, dikarenakan ada beberapa faktor seperti tidak ada waktu untuk mencatat, terlalu sulit ataupun tidak terbiasa. Seperti halnya yang dikatakan informan bahwa kurang ada peran dari informan dalam pencatatan pengeluaran dan belanja. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya waktu untuk mencatat

e. Menabung Secara Periodik

Menabung secara periodik keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung biasanya dilakukan dari hasil kiriman atau remitansi dari keluarga yang ada di luar negeri selalu disisihkan dan ditabung untuk kebutuhan dimasa yang akan datang. Pengiriman terkadang dilakukan sebulan sekali, dua bulan sekali hingga tiga bulan sekali. Akan tetapi pengiriman selalu dilaksanakan secara rutin dengan jumlah uang kiriman yang

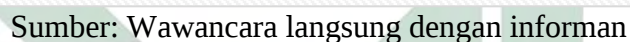
Sehingga ketika seseorang telah mempunyai keyakinan pada lembaga keuangan syariah maka masyarakat akan merasakan manfaatnya dari produk dan jasa lembaga keuangan syariah.

Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan informan 1 dan informan 2 telah yakin membuka tabungan syariah pada perbankan syariah ataupun lembaga non bank syariah diperkenalkan salah satu produk lembaga keuangan syariah oleh teman informan. Namun dalam transaksi sehari-hari informan 1 belum menggunakan produk tabungan syariah pada perbankan syariah karena beberapa alasan seperti lokasi perbankan syariah yang tidak ada di Kecamatan Ngantru dan juga masih ada pemikiran bahwa apakah benar akad-akad pada lembaga keuangan syariah sudah sesuai syariat Islam atau belum.

Sedangkan informan 2 yang menggunakan produk tabungan emas pada pegadaian syariah juga mengungkapkan hal yang sama. Dalam praktiknya informan 2 masih belum menggunakan produk pada lembaga keuangan non bank tersebut secara penuh. Hal tersebut dikarenakan faktor jarak juga yang menjadi halangan, serta alasan waktu dalam menempuh jarak tersebut.

Komponen-komponen literasi keuangan syariah yang digunakan untuk mengetahui peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada pemanfaatan hasil remitansi di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ini sangat efisien. Informasi-

Pemanfaatan Dana Remitansi Oleh Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

[illegible]

oleh latar belakang dan lingkungan sosial yang sangat berbeda sehingga pengendali keputusan-keputusan keuangannya tidaklah sepenuhnya tergantung pada literasi keuangan (Agus Yulianto, 2018:27). Seperti banyaknya bank konvensional di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menyebabkan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) banyak yang menggunakan produk dan jasa keuangan konvensional karena dirasa dekat dengan rumah mereka.

Sedangkan perilaku keuangan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan informan yang telah mempunyai perilaku keuangan seperti selalu membayar tagihan tepat waktu seperti membayar listrik dan PBB, membuat anggaran pengeluaran dan belanja jadi menyisihkan sebagian dana untuk anggaran belanja, menabung secara periodik yang mana setiap mendapat kiriman dari luar negeri sisa dari pengeluaran konsumtif akan ditabung.

Selain itu juga, menyediakan dana tidak terduga khususnya untuk dana kesehatan. Informan juga membandingkan harga sebelum membeli barang misal perbandingan harga di toko satu dengan toko lainnya atau perbandingan di pasar dan supermarket, sehingga informan akan membeli barang dengan kualitas sama dan harga lebih rendah. Hanya saja informan tidak pernah mencatat pengeluaran dan belanja karena dirasa tidak dibutuhkan, sehingga masih belum sepenuhnya bisa mengontrol keuangan atau membandingkan pengeluaran sekarang dan sebelumnya. Akan tetapi,

tingkat perilaku keuangan setiap informan berbeda-beda. Informan yang mempunyai tingkat perilaku tertinggi adalah informan 1 dan informan 2.

Mengenai keterampilan keuangan seperti manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan syariah masih belum dipahami oleh informan. Membedakan istilah-istilah yang ada pada lembaga keuangan syariah pun masih awam di kalangan masyarakat khususnya keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan hasil wawancara tingkat keterampilan keuangan, informan 1 dan informan 2 lebih baik dari pada informan 3 hingga informan 7.

Hal tersebut dikarenakan informan 1 dan informan 2 yang mempunyai salah satu produk lembaga keuangan syariah yang mana informan 1 mempunyai tabungan syariah pada perbankan syariah dan informan 2 mempunyai tabungan emas pada pegadaian syariah. Sehingga, informan 1 dan 2 hanya mengetahui beberapa produk keuangan syariah tetapi tidak memahami pengaplikasiannya. Sedangkan informan 3 hingga informan 7 sama sekali tidak mengetahui tentang keuangan syariah.

Terkait dengan keyakinan informan 1 dan informan 2 menggunakan produk atau jasa lembaga keuangan syariah masih belum sepenuhnya meyakini. Hal tersebut dikarenakan selain lokasi bank syariah jauh dan juga dirasa bank syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai syariat Islam. Dengan istilah lain praktiknya tidak sesuai dengan teori. Sehingga meskipun mereka mempunyai produk pada lembaga keuangan syariah tetapi belum menggunakan atau mengaplikasikannya secara penuh. Sedangkan

informan 3 hingga informan 7 sama sekali tidak meyakini keuangan syariah karena sudah mempunyai produk pada bank konvensional.

Berdasarkan wawancara dengan tujuh informan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung masih tergolong rendah atau kurang. Seperti dalam komponen-komponen literasi keuangan syariah, peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama dalam hal pengetahuan keuangan syariah dan keyakinan keuangan syariah masih rendah. Sehingga dari penelitian ini, terdapat 2 informan atau 28,6% dari informan yang mempunyai tingkat literasi keuangan syariah yang rendah (*less literate*), sedangkan 5 informan atau 71,4% dari informan tidak mempunyai tingkat literasi keuangan syariah (*not literate*).

Semakin baik tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) maka akan semakin pula pengelolaan keuangan keluarga mereka yang mana dapat mencukupi segala kebutuhannya (Dian Wahyunita, 2019: 73). Dengan pengelola keuangan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perlunya pengontrolan keuangan yang masuk dan keluar dapat meminimalisir pengeluaran besar yang tidak terlalu dibutuhkan.

jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja menjadikan minimnya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi. Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Negeri Kabupaten Tulungagung yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian tersebut dirasa penghasilannya tidak sebanding dengan pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sehingga sebagian dari masyarakat di Kecamatan Negeri Kabupaten Tulungagung memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan perekonomian pada keluarga. Remitansi sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan di luar negeri menjadi penunjang terbentuknya

jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja menjadikan minimnya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi. Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Negeri Kabupaten Tulungagung yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian tersebut dirasa penghasilannya tidak sebanding dengan pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sehingga sebagian dari masyarakat di Kecamatan Negeri Kabupaten Tulungagung memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan perekonomian pada keluarga. Remitansi sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan di luar negeri menjadi penunjang terbentuknya

jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja menjadikan minimnya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi. Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Negeri Kabupaten Tulungagung yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian tersebut dirasa penghasilannya tidak sebanding dengan pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sehingga sebagian dari masyarakat di Kecamatan Negeri Kabupaten Tulungagung memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan perekonomian pada keluarga. Remitansi sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan di luar negeri menjadi penunjang terbentuknya

jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja menjadikan minimnya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi. Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Negeri Kabupaten Tulungagung yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian tersebut dirasa penghasilannya tidak sebanding dengan pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sehingga sebagian dari masyarakat di Kecamatan Negeri Kabupaten Tulungagung memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan perekonomian pada keluarga. Remitansi sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan di luar negeri menjadi penunjang terbentuknya

bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini dapat menjadi indikator penting demi memajukan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Pada BAB III tentang hasil penelitian halaman 83-98 bahwa keluarga yang bekerja di luar negeri menjadi kunci naik atau menurunnya ekonomi keluarga. Hasil pengiriman uang dikirimkan rutin menjadi pegangan hidup keluarga yang ada di tanah air.

Keadaan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu contoh betapa sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Keberhasilan beberapa tokoh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Akan tetapi, bekerja di luar negeri harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif pada keluarga yang ditinggalkan dan juga pada pribadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu sendiri.

Pengorbanan sanak keluarga bekerja di luar negeri yang selanjutnya akan mengirimkan uang sebagai bukti hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Remitansi harus benar-benar dikelola dengan baik oleh keluarga di Indonesia, karena apabila keluarga tidak bisa mengelola dengan baik maka akan merugikan dan dapat berakibat lebih buruk dari sebelumnya. Sehingga perlunya lembaga keuangan yang membantu memberikan motivasi untuk mengelola keuangan dengan baik.

dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Menghapus kemiskinan adalah impian dari seluruh negara berkembang yang ada di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia yang merupakan negara agraris yang masih tergantung pada hasil alam dan lautnya. Tidak semua masyarakat mempunyai lahan untuk investasi jangka panjang, baik lahan persawahan ataupun lahan untuk usaha lain seperti berdagang atau membuka sebuah kos atau kontrakan. Masyarakat miskin dan rentan sulit untuk mengakses sumber ekonomi seperti halnya hak layanan dasar.

Konsep kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai masalah ekonomi keuangan, namun juga mencakup segala aspek sosial. Kemiskinan didefinisikan tidak hanya sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, namun juga ketidakmampuan mengakses layanan dasar hidupnya secara memadai. Seperti halnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, untuk mengurangi kemiskinan maka diperlukan pelayanan yang intens dari pemerintah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah upah yang dibayarkan dari bekerja di daerah asal masih tergolong sangat rendah. Dengan UMK Kabupaten Tulungagung sebesar Rp1.958.844,16. Sedangkan penghasilan yang didapat dengan bekerja sebagai PMI yaitu bekisar

Rp2.500.000,00 hingga Rp3.500.000,00 bagi pekerja formal atau informal seperti Malaysia. Selain itu juga dibanding dengan bekerja sebagai petani atau buruh tani yang setiap bulannya mendapat penghasilan kurang lebih Rp 1.000.000,00-1.500.000,00 apabila bekerja penuh selama satu bulan.

Sehingga hal tersebut menjadi sebuah dorongan bagi masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung untuk memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari penghasilan yang didapatkan diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, dana untuk membuka usaha kerja di daerah asal, membeli transportasi ataupun elektronik serta untuk berinvestasi. Jadi, dengan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat menghapus kemiskinan dan mengangkat derajat keluarga.

Berdasarkan komponen-komponen literasi keuangan syariah, salah satunya adalah seseorang harus mempunyai perilaku keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mempunyai perilaku keuangan yang baik maka akan mampu memanfaatkan hasil remitansi dengan baik pula. Seperti halnya dalam memanfaatkan hasil remitansi untuk kebutuhan konsumtif, kebutuhan produktif hingga kebutuhan untuk dana kebajikan. Karena bagaimanapun pula sebagai seorang muslim harus menunaikan kewajiban zakat serta berbagi dengan sesama.

Sebagaimana pada BAB III Gambaran Umum Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung halaman 77 terdapat tujuh sekolah mulai dari TK, RA, SD, MI, SMP, MTS hingga SMA/MA dengan jumlah siswa dan siswi kurang lebih 7.786 jiwa. Para penerus bangsa tersebut yang akan meneruskan perjuangan orang tua mereka kelak, sehingga perlu mendapatkan pendidikan berkualitas untuk

meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Baik laki-laki ataupun perempuan, baik kaya ataupun miskin berhak mendapatkan pendidikan yang sama.

Mempunyai pendidikan berkualitas, dapat memberikan dampak positif yang mana mereka akan mempunyai *passion* keahlian untuk siap kerja. Orang yang berilmu akan mudah mendapatkan pekerjaan bahkan berinovasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Setiap anak atau keluarga yang bersekolah diharapkan dapat membantu dan menunjang perekonomian yang lebih maju kelak di masa depan.

Literasi keuangan syariah keluarga PMI dapat membantu mewujudkan program pemerintah berupa SDGs ini pada poin keempat yaitu pendidikan berkualitas. Hal tersebut dimaksudkan bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan syariah masyarakat maka pemikiran akan masa depan semakin baik pula. Mempunyai literasi keuangan syariah yang baik maka akan mampu mengelola keuangan keluarga, dan apabila mereka mampu mengelola keuangan dengan baik maka mereka mampu menyekolahkan anak atau keluarganya hingga perguruan tinggi.

Sehingga bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung alokasi remitansi juga diperuntukkan untuk dana pendidikan. Biaya sekolah yang bisa dikatakan tidak murah ini mejadi salah satu faktor yang menyebabkan

3. Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDGs poin kedelapan)

Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) diharapkan dapat memajukan perekonomian keluarga, yang mana sebelumnya mengalami keterpurukan ekonomi. Di sinilah peran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian yang ada dilingkungan sekitar mereka. Seperti halnya mendorong dan membina usaha produktif masyarakat baik dalam hal permodalan, manajemen maupun pemasaran hasil produk. Sehingga pemerintah dapat membantu dan mengawasi masyarakat yang mempunyai usaha.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri telah melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi para keluarga atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna yang ingin mengembangkan jiwa *entrepreneur*. Hal ini dapat membuat Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna berpikir ulang akan kembali ke luar negeri atau membuka peluang kerja di Indonesia. Sehingga, program ini dapat mendorong perekonomian yang lebih inklusif.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga mempunyai peran penting untuk membantu pengelolaan dana keluarga. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka perlunya peningkatan literasi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dapat mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berupa pengenalan lembaga keuangan syariah. Hanya saja selama ini belum ada lembaga keuangan syariah yang mempromosikan produk dan layanan jasa keuangan syariah pada masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Disisi lain peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan negara. Di Kabupaten Tulungagung sendiri dengan adanya PMI ke luar negeri yang menghasilkan remitan kurang lebih menghasilkan 2 triliun setiap tahunnya. Bahkan apabila terjadi jumlah peningkatan PMI di Kabupaten Tulungagung, akan lebih banyak lagi devisa negara yang dikantongi.

Tabel 4.13 Dampak keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mewujudkan SDGs

NO.	Tujuan SDGs	Penjelasan
1.	Mengapus Kemiskinan (SDGs tujuan kesatu)	Mempunyai literasi keuangan syariah yang baik dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat menghapus kemiskinan, hal tersebut dikarenakan PMI mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang kemudian dikirimkan ke tanah air. Remitansi yang diterima di tanah air akan dialokasikan ke beberapa kebutuhan sesuai bagan 4.3 halaman 118.
2.	Pendidikan Berkualitas (SDGs tujuan keempat)	Sebagian hasil remitansi dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dialokasikan untuk biaya pendidikan, supaya keluarga yang ada di tanah air mendapatkan pendidikan yang berkualitas hingga perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dimasa depan. Selain itu, pengenalan lembaga keuangan syariah juga bisa dikenalkan melalui pendidikan sekolah.
3.	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDGs tujuan delapan)	Mendapatkan pekerjaan yang layak adalah keinginan setiap orang. Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga berharap di luar negeri mendapat pekerjaan yang layak, sehingga dapat menghasilkan

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, dampak dari adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) diantaranya adalah menghapus kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Keluarga yang semula belum bisa mencukupi kebutuhan perekonomian, setelah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi mendongkrak perekonomian keluarga kearah yang lebih baik. Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat mengelola remitansi dengan baik adalah tanggungjawabnya di tanah air.

[illegible]

Apabila informan 1 dan 2 telah meyakini dan lebih mendalami keuangan syariah, mereka akan mendapatkan manfaat dan hasil dari penggunaan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang mana dapat mengelola remitansi sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan informan 3 hingga informan 7 yang tidak mempunyai tingkat literasi keuangan syariah tidak akan mendapatkan manfaat serta ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah kecuali ada pihak yang bersedia memberikan edukasi.

Selain itu, penggunaan produk atau layanan jasa keuangan syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih maju. Data pada Bank Indonesia menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah daripada tingkat literasi keuangan konvensional. Disisi lain, inklusi keuangan syariah masih sangat jauh di bawah daripada keuangan konvensional. Padahal masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam yang seharusnya lebih mengenal perbankan syariah dalam transaksi kesehariannya.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga berdampak pada pendidikan bagi keluarga yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Mereka bisa menyekolahkan anak atau sanak keluarganya pada sekolah yang unggul hingga perguruan tinggi. Informan yang merupakan keluarga PMI ini, dapat menyekolahkan anak atau sanak keluarga hingga perguruan tinggi. Rata-rata perguruan tinggi berada di luar Kabupaten Tulungagung, sehingga informan juga mampu membiayai biaya kos dan kehidupan sehari-

hari di kota lain dari hasil remitansi. Bagi negara, anak yang mempunyai pendidikan yang berkualitas dapat mencerdaskan bangsa dan dapat memajukan Indonesia dalam bidang apapun baik pendidikan itu sendiri, perekonomian, pembangunan, teknologi dan lain sebagainya.

Sesuai pada SDGs tujuan kedelapan bahwasannya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri. Dengan mendapatkan pekerjaan yang layak akan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk keluarga di daerah asal dan juga untuk pembangunan di negara. Sumbangsih devisa dari remitansi dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dalam transaksi ekspor impor perdagangan atau membayar hutang negara.

Kabupaten Tulungagung sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peran PMI pada Kabupaten Tulungagung mendorong pembangunan dan perekonomian yang ada di daerah. Proses distribusi perdagangan dan mudahnya pembangunan yang ada di Kabupaten Tulungagung berasal dari devisa para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Maka dari itu, perlunya peran pemerintah dalam melindungi PMI yang ada di luar negeri, membantu proses pemberangkatan, saat di luar negeri dan kepulangan. Sehingga PMI akan merasa aman dalam menjalankan pekerjaannya di luar negeri.

Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi tujuan pada sidang PBB dalam memanjukkan negara berkembang juga berlaku di Indonesia khususnya Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Alokasi penggunaan remitansi oleh keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah juga mendorong terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Peran pemerintah, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti halnya menghapus kemiskinan dengan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan; meningkatkan pendidikan yang berkualitas hingga

2. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi tujuan pada sidang PBB dalam memanajukan negara berkembang juga berlaku di Indonesia khususnya Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Alokasi penggunaan remitansi oleh keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah juga mendorong terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Peran pemerintah, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti halnya menghapus kemiskinan dengan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan; meningkatkan pendidikan yang berkualitas hingga

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat mengelola keuangan remitansi dengan baik. Pengalokasian remitansi yang baik dapat membantu permasalahan perekonomian yang ada pada keluarga yang berkeadilan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Peran lembaga keuangan syariah juga dapat membantu keluarga dalam mengelola keuangan tersebut dengan produk dan layanan keuangan syariah yang telah ditawarkan. Dengan demikian, diharapkan keluarga PMI dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) diupayakan untuk dapat mengelola keuangan remitansi dengan baik. Pembagian atau pengalokasian remitansi yang baik dapat membantu mengatasi permasalahan perekonomian yang ada pada keluarga berdasarkan syariat Islam. Peran lembaga keuangan syariah juga dapat membantu mengelola keuangan tersebut dengan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang telah ditawarkan. Dengan menggunakan salah satu produk atau layanan jasa keuangan syariah dapat mendorong tingkat literasi keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin meningkat. Selain itu, peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat membantu mewujudkan program pemerintah berupa *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Hasil

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an 25: 67
- Al Qur'an 65: 7
- Ahmad Soleh1. (2017). "Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia".6(2).
- Akmal, H., & Saputra, Y. E. K. A. (2016). "Analisis tingkat literasi keuangan". *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2).
- Ali, Fachrul. (2013). "Participatory Rural Appraisal (PRA) Dalam Evaluasi Pembangunan", diakses pada tanggal 07 April 2020 dalam http://irawanali.blogspot.co.id/2013/06/participatory-rural-appraisal-pra-dalam_8.html.
- Aprilliana, Dewi dan Luh Gede Meydianawathi. (2013). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengiriman Remitansi TKI Asal Bali Di Amerika Serikat", *E-Jurnal EP UNUD*, Vol. 2, No. 8, Agustus.
- Chambers, Robert. (1996). *Participatory Rural Appraisal Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dibyantoro, Bayu dan Muhammad Mukti Alie. (2014). "Pola Penggunaan Remitan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Dengan Asal". *Teknik PWK*, Vol. 3, No. 2.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dibyantoro, Bayu dan Muhammad Mukti Alie. (2014). "Pola penggunaan remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) serta pengaruhnya terhadap perkembangan daerah asal, *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 3, No. 2.
- Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha". *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syaria'ah*, 10(1).
- Handida, Rahmawati Deylla dan Maimun Sholeh. (2018). "Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan

- Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Economia*, Vol. 14, No. 1, April.
- Haryati, Eny. “Remitansi Tenaga Kerja Indonesia: Dampaknya Terhadap Inflasi dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”. *Ekuitas*, Vol. 13, No. 3.
- Hoelman, Mickael B. dkk. (2016). *Sustainable Development Goals-SDGs Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta.
- Iqtishad Consulting, “Membangun Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia” dalam <http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/membangun-literasi-keuangan-syariah-di-indonesia>, diakses pada Senin, 20 Januari 2019, Pukul 19.00 WIB.
- Jati, W. R. (2015). "Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia?" *Populasi*, 23(1), 1–19.
- Khosasi, Aksanul. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo”. Surabaya: Skripsi, 2017.
- Kurniawati, Irza Desy. 2017. "Pengaruh Sikap Terhadap Uang Dan Pengetahuan Keuangan Dengan Mediasi *Locus Of Control* Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga", (Surabaya: Artikel Ilmiah).
- Lubis, Nurul Izzati. (2019). “Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia”. Medan: Skripsi.
- Luthfy, Haidar. (2017). “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. Skripsi-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia.
- Noveria, M. (2017). "Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung". *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1).
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah". *Ekspansi: Jurnal Ekonomi*,

